BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kantor Pengadilan Agama Banjarbaru

1. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banjarbaru

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan,
- b. Waris,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf,
- f. Zakat,
- g. Infaq,
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah.

Sedangkan Fungsi Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006).

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya :
 - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan

instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarbaru

Berikut tabel struktur organisasi Pengadilan Agama Banjarbaru

Tahun 2023:

NO.	NAMA	JABATAN
1	Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.	Ketua
2	Mhd. Habiburrahman, S.HI, M.Sy.	Wakil Ketua
3	Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.	Hakim
4	H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.	Hakim
5	Hj. Murnianti, S.H.	Panitera
6	Hj. Burdatul Aisyiah, S.Ag.	Sekretaris
7	Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.	Panitera Muda Gugatan
8	Erny Farida, S.H.I.	Panitera Muda Permohonan
9	Agustian Raihani, S.H.I.	Panitera Muda Hukum
10	Reni Azkia Inayati	Kasubbag Kepegawaian,

		Organisasi dan Tata Laksana
11	Maulida, S.Kom., M.M.	Kasubbag Umum dan Keuangan
12	Wardah	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
13	Endah Dwi Luciana, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
14	Kevin Anjati Putri, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
15	Diana Andrea Rachman, A.Md.M.	Pengelola Perkara
16	Muhammad Hasmi, S.Kom	Pranata Komputer
17	Syahrani, S.H.	Jurusita
18	Arbain	Jurusita
19	Ahmad Zaki Anshari	Jurusita
20	H. Misran Nafarin, S.Ag.	Jurusita Pengganti
21	Dra. Mardawiah, M.H.	Panitera Pengganti
22	Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.	Panitera Pengganti
23	Hj. Norhijaziah, S.Ag.	Panitera Pengganti
24	A. Rizqon Faghfirli, S.H.	Panitera Pengganti
25	Noor Hikmah, S.H.	Panitera Pengganti

B. Penyajian Data

1. Informan I

Nama	: Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: S2
Profesi	: Hakim
Jabatan	: Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru

Menurut penuturan Ibu Hj. Lia Auliyah selaku Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai implementasi PERMA no 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru.

“Kalau pengimplementasian PERMA masih banyak para pihak yang menggunakan persidangan secara manual. Akan tetapi, dari pihak Pengadilan Agama Banjarbaru sendiri sebenarnya sudah melakukan sosialisasi secara maksimal, bisa berupa lewat website, medsos, banner pamflet atau brosur. Dan di Banjarbaru sendiri kebanyakannya sudah banyak menggunakan pengacara, kalau pengacara otomatis sudah memiliki *e-court* dan harus menggunakan *e-court* dari awal, serta Kota Banjarbaru ini kan sebenarnya tidak begitu luas kecil saja dan rata-rata para pihaknya hadir. Kalau pihaknya memasukkan kepada pengacara apalagi dua-duanya sudah maka *E-Litigasi*. Dan kenapa masih sedikit yang berperkara dengan cara elektronik, karena memang kami dari pihak Pengadilan Agama Banjarbaru tidak bisa memaksa. Beda halnya ketika saya masih bertugas di Gianyar Bali, dan itu ada sekitar 34 perkara dalam setahun dan itu bisa di *e-court* kan semuanya, dan waktu itu ada semacam strategi seperti pemaksaan dan itu diwajibkan. Sedangkan di Pengadilan Agama Banjarbaru ini enggak, karena melihat berbagai pertimbangan lain. Memang bagus, lebih murah serta cepat dan tidak harus datang ke Pengadilan, Namun disisi lain ada pertimbangan lain juga sehingga kami tidak mengharuskan semuanya menggunakan secara *e-litigasi* atau elektronik.”³³

Mengenai penjelasan informan dalam pengimplementasian PERMA persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru sudah berjalan

³³ Lia Auliyah, Ketua sekaligus Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 6 Desember 2023 pukul 10.30 Wita.

secara maksimal. Namun, masih banyak para pihak yang berperkara secara manual tanpa menggunakan *e-court* atau *e-litigasi*. Disini pihak pengadilan tidak memaksa atau mewajibkan para pihak yang ingin berperkara secara *e-litigasi* dan memberikan kebebasan kepada masyarakat sendiri, lebih cenderung mau memilih menggunakan yang mana, bisa secara *e-litigasi* bisa juga secara manual atau umum. Hal tersebut dikarenakan berbagai macam pertimbangan lain agar tidak adanya kesulitan, kerugian, dan PERMASalahan dalam hal ini.

Lalu Ibu Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H. menjelaskan:

“Kalau untuk sosialisasi di PTSP kami udah seringkali di briefing ke orang PTSP, harus apa sarannya gimana dan feedback dari pegawainya seperti apa. Kami sudah mengingatkan terkait dengan *e-litigasi* tolong dibantu. Jadi yang jelas dari pimpinansi selalu menyarankan nya mereka dikasih pilihan, silahkan memakai *e-litigasi* seperti ini kalau secara manual seperti ini. Dan juga seringkali kami melakukan sosialisasi ke luar entah ada acara apa pertemuan dimana, terkadang kami suka menyisipkan masalah inovasi tentang *e-litigasi* ini. Jika saya disuruh memilih lebih menggunakan elektronik atau manual saya lebih milih *e-litigasi*. Namun misalkan ketika saya mewajibkan elektronik semua ternyata kan ada beberapa orang yang kurang mengerti, kurang mendukung juga karena plus minus nya banyak sekali. Apalagi sekarang sudah berganti PERMA nya menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022, disitu yang memanggil para pihak bukan Jurusita lagi tapi petugas kantor pos. Petugas pos kan bukan Sarjana Hukum ya yang mengerti dan paham tentang pemanggilan para pihak yang secara resmi dan patut seperti apa, terkadang banyak masalah disini seperti beberapa kasus pengantaran surat. Katanya para pihak tidak bertempat tinggal disitu atau tidak menemukan alamatnya maka dibawa kembali suratnya, padahal jelas-jelas alamatnya sudah benar. Maka dari itu kita tidak mewajibkan, jadi sempat saya juga ingin mewajibkan untuk memakai *e-court* namun disini berbedalah, suasananya berbeda dan kebutuhannya pun berbeda. Terkait Sarana prasarana sudah mendukung ya, internet sudah lancar terus proyektor sudah ada serta lengkap dan sebagainya. Dan untuk kendala-kendalanya disini lebih ke budaya dari masyarakat nya sendiri yang memilih menggunakan secara apa, *e-litigasi* atau manual dan kebanyakannya secara manual atau umum serta faktor kerjasama dari pihak luar yang memanggil yang memang perlu banyak pelatihan-pelatihan biar sesuai dengan peraturan dan dasar hukum yang berlaku.”³⁴

³⁴ Lia Auliyah, Ketua sekaligus Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 6 Desember 2023 pukul 10.30 Wita.

Menurut penjelasan informan terkait kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian PERMA persidangan secara elektronik di pengadilan yaitu budaya dari masyarakat nya sendiri yang kebanyakannya lebih memilih berperkara secara manual ketimbang *e-litigasi* dan faktor pihak luar yang tidak mendukung.

2. Informan II

Nama : H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir : S2

Profesi : Hakim

Jabatan : Hakim Pratama Muda

Penjelasan Bapak H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H:

“Sebenarnya saya lebih memilih persidangan secara *e-litigasi* atau menggunakan *e-court* karena hal tersebut lebih mudah sedangkan persidangan secara manual untuk yang tatap mukanya itu hanya pada waktu pembuktian saja dan untuk jawab-jawab, kesimpulan dan putusan itu di upload. Persidangan secara *e-litigasi* ini sangat memudahkan dan efektif bagi kami, apalagi jumlah perkaranya banyak disini. Tapi, memang untuk persidangan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Banjarbaru sendiri sebenarnya rendah, banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Disatu sisi meskipun kita tinggal di kota, tapi orang yang berperkara kadang orang-orang yang tinggal di desa, sudah tua, dan dia tidak punya *email* atau bahkan *handphone*. Sehingga untuk berperkara menggunakan *e-court* tidak memungkinkan, salah satu syarat untuk menggunakan *e-court* kan harus punya *email* kemudian harus punya nomor rekening (ATM), jika seandainya tidak ada maka menggunakan secara manual. Menurut saya salah satu faktor terhadap rendahnya persentase persidangan secara *e-litigasi* ini adalah SDM dari pihak masyarakatnya, terus ketika sosialisasi sebenarnya sangat mendorong disini, namun pada waktu ditanyakan nomor rekening tidak ada jawabannya gitu, sehingga untuk masalah nomor rekening kami tidak bisa bantu, kalaunya *email* masih bisa kami membuatkan nya disini.³⁵

³⁵ Ahmad Rasyidi Halim, Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 7 Desember 2023 pukul 11.00 Wita.

Menurut penjelasan informan sebenarnya sudah melakukan penerapan dan sangat mendorong mengenai *e-litigasi* melalui sosialisasi secara massif. Informan lebih memilih persidangan secara *E-Litigasi* dibanding yang secara manual, karena hal tersebut jauh lebih mudah, murah, cepat, serta tidak harus datang ke pengadilan. Akan tetapi, dalam persentasinya penggunaan nya masih rendah dikarenakan faktor dari SDM pihak masyarakatnya. Seperti dari pihak yang berperkara nya sudah tua tidak mempunyai *email* atau handphone dan nomor rekening (ATM) sehingga tidak memungkinkan untuk berperkara secara elektronik.

Kemudian Bapak H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H menjelaskan:

“Sebenarnya sebelumnya itu pernah dari kami untuk perkara permohonan itu semuanya wajib *e-litigasi*, tapi memang ada kendala-kendala dalam pelaksanaannya. *Email* nya enggak ada lalu dibuatkan, akhirnya yang kena pegawai disini yang kerepotan, akhirnya dihapus kebijakan itu. Mengenai kendala yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini menurut saya adalah Pertama, Kurangnya ketertarikan dari masyarakat sendiri karena diribetkan dengan hal-hal yang berbaur teknologi. Sehingga meskipun disini dibidang kota, tapi ketika orang-orang nya gaptek (gagap teknologi) tidak bisa juga kita memaksakan, mau kita paksakan mereka yang kasihan. Misalkan kita buat *email*, nantikan untuk jawab jinawab, pembacaan putusan harus membuka *email*. Meskipun diawal kita buat kemudian dia tidak tau nanti akhirnya gimana tahapan selanjutnya seperti apa ya kasihan juga. Maka dari itu untuk masyarakat yang kurang terhadap pengetahuan teknologi informasi tetap kita laksanakan secara manual, supaya ada interaksi antara hakim dan pihak ketika ada PERMA salahan, jadi ketika para pihak merasa bingung ia bisa bertanya langsung. Lalu yang kedua, kurangnya kebijakan, seandainya ruang untuk secara manual itu ditutup tidak ada lagi misalnya semuanya harus wajib *e-court* atau *e-Litigasi*, maka tidak ada pilihan lagi. Jadi untuk pengimplementasian ini ada plus minus nya yang mana kelebihanannya murah, cepat akan tetapi bagi sebagian orang malah menjadi ribet karena tidak melek terhadap pengetahuan teknologi. Dan juga di Pengadilan Agama ini masih digunakan secara manual ya karena dari segi ekonomis jurusita itu diuntungkan kalaunya secara manual, ia mendapatkan upah biaya relaas panggilan, kalau melalui *e-court* jurusita tidak mendapatkan upah karena sudah by sistem dan itu gratis tidak dipungut biaya sama sekali.”³⁶

³⁶ Ahmad Rasyidi Halim, Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 7 Desember 2023 pukul 11.00 Wita.

Berdasarkan penjelasan dari informan yang menjadi kendala-kendala dalam implementasi PERMA ini adalah kurangnya ketertarikan dari masyarakat sendiri karena diribetkan dengan hal-hal yang berbaur dengan teknologi sehingga kurang mengerti dan kurang memahami akan persidangan secara *e-litigasi*. Hal ini tertuju pada orang-orang yang sudah tua yang gagap terhadap teknologi, tidak mempunyai *email* bahkan ada juga yang tidak mempunyai handphone. Dan kurangnya kebijakan terhadap pelaksanaan persidangan melalui *e-litigasi*.

3. Informan III

Nama : Agustian Raihani, S.H.I.

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : S1

Profesi : Panitera

Jabatan : Panitera Muda Hukum

Mengenai penjelasan bagaimana implementasi atau penerapan PERMA no 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru ini Ibu Agustian Raihani, S.H.I. menyebutkan sudah sesuai dan berjalan lancar. Dan untuk setiap tahun grafiknya mulai meningkat.

Menurut penjelasan informan terdapat dalam Data Rekapitulasi Laporan Penerimaan dan Penanganan Perkara *E-Court* Pada Pengadilan Agama Banjarbaru, disana tertera pada tahun 2019 untuk total jumlah perkara *e-litigasi* ada 2 perkara, tahun 2020 untuk perkara *e-litigasi* ada 11 perkara dari 113 perkara melalui *e-court*, pada tahun 2021 menurun lagi untuk perkara *e-litigasi* ada 9 perkara dari 112 perkara melalui *e-court*, dan pada tahun kemarin 2022 tadi meningkat drastis yaitu

total jumlah perkara secara *e-litigasi* ada 43 perkara dari 112 perkara yang menggunakan *e-court*.³⁷

Meskipun jika dilihat secara data masih bisa dibilang dibawah rata-rata 50% belum sampai setengahnya dari semua total persidangan untuk para pihak yang berperkara menggunakan elektronik. Akan tetapi hal tersebut sudah memperlihatkan adanya perubahan dan kemajuan terhadap pelaksanaan persidangan secara elektronik.

Sedangkan kendala yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian PERMA No 1 tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru menurut informan lebih ke faktor masyarakat nya. Masyarakat umum masih belum terlalu bisa terhadap teknologi, dan jikalau ada, kebanyakan dari para pihak pengadilan yang membuat, contoh seperti *email*.

Menurut Penuturan Ibu Agustian Raihani, S.H.I.:

“Pada tahun 2023 ini kami ada melakukan solusi terhadap hal ini, seperti perkara permohonan itu kami wajibkan semuanya masuk ke *e-litigasi*, ya hampir 90% lah yang masuk ke *e-litigasi* ini, makanya tahun 2023 yang sangat meningkat, perkara yang diterima 197 dan yang secara *e-litigasi* nya ada 73.”³⁸

³⁷ Agustian Raihani, Panitera di Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 7 Desember 2023 pukul 14.00 Wita.

³⁸ Agustian Raihani, Panitera di Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 7 Desember 2023 pukul 14.00 Wita.

C. Rekapitulasi dalam Bentuk Matriks

**Tabel 4.1 Ringkasan Data
Implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan
Secara Elektronik di Pengadilan
Agama Banjarbaru**

No.	Informan	Implementasi PERMA no 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru	Kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian PERMA No 1 tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru
1.	Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.	Sudah berjalan secara maksimal.	Faktor budaya dari masyarakat nya sendiri yang kebanyakannya lebih memilih berperkara secara manual ketimbang elektronik dan faktor pihak luar yang kurang mendukung.
2.	H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H	Sudah melakukan penerapan dan sangat mendorong mengenai <i>e-court</i> melalui sosialisasi secara massif.	Kurangnya ketertarikan dari masyarakat sendiri karena diribetkan dengan hal-hal yang berbaur dengan teknologi. Dan faktor dari penegak hukum karena kurangnya ketegasan kebijakan terhadap pelaksanaan persidangan melalui elektronik.
3.	Agustian Raihani, S.H.I.	Sudah sesuai dan berjalan lancar	Faktor masyarakatnya yang kurang paham terhadap teknologi.

D. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis paparkan mengenai Implementasi PERMA no 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru, maka selanjutnya penulis akan menganalisis hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru

Pelayanan Pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawah nya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.³⁹

Implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik di lingkungan Peradilan Umum dimulai sejak Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi merilis Aplikasi *e-Court* pada tanggal 13 Juli 2018. Lahirnya Aplikasi *e-Court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan secara Elektronik dan sudah dimulai sosialisasi besar besaran. Pada 2019 awal mulailah dicanangkan minimal mengajukan permohonan melalui *e-Court*.

Berdasarkan penuturan Ibu Hj. Lia Auliyah selaku ketua sekaligus hakim pengadilan Agama Banjarbaru, pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama

³⁹ Ridwan Mansyur, *Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum*, Vol. 4 No. 1, Maret 2015, hal. 89

Banjarbaru sudah berjalan secara maksimal. Dengan cara melakukan sosialisasi lewat website, medsos, banner pamflet atau brosur. Dan juga melakukan sosialisasi ke luar entah pada waktu penyuluhan atau pertemuan-peremuan dengan instansi lain, dengan cara menyisipkan masalah inovasi tentang *e-litigasi*. Namun, masih banyak para pihak yang berperkara persidangan secara manual (umum) tanpa secara *e-litigasi*.

Pihak Pengadilan Agama Banjarbaru tidak memaksa atau mewajibkan para pihak berperkara persidangan secara *e-litigasi* dan memberikan kebebasan kepada masyarakat sendiri, menggunakan secara *e-litigasi* atau secara manual. Hal tersebut dikarenakan berbagai macam pertimbangan lain agar tidak adanya kesulitan, kerugian, dan PERMASalahan terhadap para pihak yang berperkara.

Ibu Hj. Lia Auliyah menilai bahwa lebih mudah persidangan secara *e-litigasi* untuk perkara perdata karena dinilai lebih cepat, mudah, dan bisa mengadili tanpa perlu bersidang seperti metode biasa.

Berdasarkan penuturan Bapak H. Ahmad Rasyidi Halim selaku Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru, mengenai Implementasi PERMA no 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru sendiri sudah melakukan penerapan dan sangat mendorong mengenai *e-litigasi* atau elektronik ini, melalui sosialisasi secara massif.

Bapak H. Ahmad Rasyidi Halim lebih memilih persidangan secara *E-Litigasi* dibanding yang secara manual atau umum, adanya persidangan secara elektronik pendaftaran dapat dilakukan dari mana saja dan tidak dikenakan biaya panggilan.

Meskipun jauh lebih mudah, murah, cepat, serta tidak harus datang ke pengadilan. Akan tetapi, dalam persentasi penggunaannya masih rendah dikarenakan faktor dari SDM pihak masyarakatnya. Seperti dari pihak yang berperkaranya sudah lansia, tidak memiliki alamat elektronik atau bahkan handphone dan nomor rekening (ATM) sehingga tidak memungkinkan bisa menggunakan *e-court* untuk berperkara persidangan secara elektronik.

Berdasarkan penuturan informan terakhir yakni Ibu Agustian Raihani selaku Panitera Muda Hukum, terhadap pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru berjalan dengan lancar dan untuk setiap tahun grafiknya meningkat terus.

Terdapat dalam Data Rekapitulasi Laporan Penerimaan dan Penanganan Perkara *E-Court* Pada Pengadilan Agama Banjarbaru, disana tertera pada tahun 2019 untuk total jumlah perkara *e-litigasi* ada 2 perkara, tahun 2020 untuk perkara *e-litigasi* ada 11 perkara dari 113 perkara melalui *e-court*, pada tahun 2021 menurun lagi untuk perkara *e-litigasi* ada 9 perkara dari 112 perkara melalui *e-court*, pada tahun kemarin 2022 tadi meningkat drastis yaitu total jumlah perkara secara e-litigasi ada 43 perkara dari 112 perkara yang menggunakan *e-court*, dan untuk tahun 2023 ini sampai dengan bulan Desember sekarang ada 197 perkara yang diterima dan 73 perkara yang menggunakan *e-litigasi*.

Jika dilihat secara data, persentasi tersebut masih dibawah rata-rata 50% yang mana belum sampai setengahnya dari semua total persidangan untuk

para pihak yang berperkara persidangan secara elektronik. Namun, hal tersebut sudah memperlihatkan adanya perubahan dan kemajuan terhadap pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menurut penulis terhadap pengimplementasian pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru sudah sesuai dan memberikan dampak yang positif.

Semenjak tahun 2019 tepatnya tanggal 14 maret Pengadilan Agama Banjarbaru melakukan sosialisasi aplikasi *E-court* guna mewujudkan kemudahan dalam pendaftaran persidangan hingga proses persidangan secara *e-litigasi* atau elektronik. Seperti melalui media sosial berupa website, instagram, dan juga semacam banner pamflet atau brosur, serta pada waktu penyuluhan atau dalam rangka pertemuan.

Meskipun jika dilihat secara data persidangan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Banjarbaru masih belum mencapai angka 50% dari semua total jumlah perkara persidangan yang diterima. Akan tetapi, persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru setiap tahunnya mengalami peningkatan dari segi grafiknya dan secara data di Pengadilan Agama Banjarbaru merupakan yang paling banyak orang berperkara persidangan secara *e-litigasi* untuk seluruh pengadilan kelas II di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dapat dilihat dalam Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, yaitu sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang

profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Dari ketentuan tersebut, persidangan secara elektronik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara karena persidangan dapat dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Islam merupakan agama yang sangat mengedepankan kebaikan dan juga manfaat bagi umat manusia. Terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia maka hidup akan berjalan lebih mudah dan terhindar dari kemudharatan. Salah satu tujuan dari agama islam sendiri adalah menjauhkan manusia dari kemudharatan. Allah Swt tidak menghendaki kesukaran bagi manusia. Allah memberikan banyak kemudahan, karena itu ambillah kemudahan-kemudahan itu dan hindari kesukaran-kesukarannya. Sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2):185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِيُثْكَمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِيُتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. (QS.Al-Baqarah (2):185).”⁴⁰

Sesuai yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-

⁴⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat."

Dengan adanya Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 hal tersebut mendatangkan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan maupun anggota pengadilan. Pihak yang berperkara mendapatkan kemudahan untuk tidak perlu datang ke pengadilan dan mendapatkan transparansi biaya yang dikeluarkan selama beracara di pengadilan terutama di pengadilan Agama Banjarbaru. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penggunaan persidangan secara *e-litigasi* yaitu dengan terus melakukan sosialisasi dengan berbagai inovasi melalui berbagai macam media sehingga dapat meningkatkan kemajuan semua peradilan di seluruh Indonesia.

2. Kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian PERMA No 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru

Dalam pengimplementasian PERMA No 1 tahun 2019 mengenai persidangan secara *e-Litigasi* tentu tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar. Terdapat beberapa faktor kendala-kendala yang menjadi hambatan selama pengimplementasiannya di Pengadilan Agama Banjarbaru, diantaranya:

a. Faktor Budaya Setempat

Mengenai hal ini faktor budaya dari masyarakat setempat menjadi salah satu kendala hambatan terhadap persidangan secara *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Banjarbaru. Kebiasaan masyarakat yang kebanyakannya lebih memilih

berperkara secara manual ketimbang *e-litigasi*. Menanggapi persidangan secara *e-litigasi* dianggap lebih sulit dan ribet serta perlu banyak persyaratan yang harus dipersiapkan. Dan pengetahuan masyarakat tentang apa yang mereka rasakan terhadap persidangan secara manual atau umum yang dimana mereka merasa lebih simpel dan nyaman karena dapat berinteraksi langsung secara tatap muka antara pihak berperkara dan pihak pengadilan jika ada terdapat hal-hal yang membingungkan dan kurang paham.

Mengenai faktor budaya ini seperti penuturan Ibu Hj. Lia Auliyah :

“Untuk kendala-kendalanya disini lebih ke faktor budaya dari masyarakat nya sendiri yang mau memilih menggunakan secara apa, *e-litigasi* atau manual dan kebanyakannya adalah secara manual atau umum.”

b. Faktor Masyarakat Terhadap Kurangnya Pengetahuan Teknologi

Mengenai kendala-kendala yang menjadi hambatan pengimplementasian PERMA No 1 tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru yaitu faktor pemahaman kebanyakan masyarakat yang masih gagap terhadap teknologi. Kurangnya ketertarikan dari masyarakat sendiri karena diribetkan dengan hal-hal yang berbaur dengan teknologi sehingga minimnya persidangan secara *e-litigasi* didasarkan oleh hal tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan penuturan dari bapak H. Ahmad Rasyidi Halim, meskipun Banjarbaru ini dibilang kota besar, tetapi ketika masyarakatnya gaptek (gagap teknologi) tidak bisa juga pihak pengadilan memaksakan, jika dipaksakan hal tersebut bisa menyusahkan masyarakat. Misalkan mereka dibuatkan email, terus untuk jawab jinawab, pembacaan

putusan harus membuka email. Meskipun diawal sudah dibuatkan kemudian para masyarakat tidak tau tahapan selanjutnya, hal tersebut menyulitkan akhirnya. Maka dari itu untuk masyarakat yang kurang terhadap pengetahuan teknologi informasi pihak pengadilan mereka tetap melaksanakan secara manual, agar selalu ada interaksi antara hakim dan pihak ketika ada PERMASalahan, jadi ketika para pihak merasa bingung mereka bisa bertanya langsung.

Adanya hal baru di peradilan Indonesia membutuhkan waktu untuk bertransisi dari peradilan secara manual ke peradilan secara elektronik. Tingginya angka pendaftaran perkara dan persidangan secara manual dikarenakan kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara. Hal ini adalah faktor penghambat yang sangat dominan dalam pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Disisi lain, bapak H. Ahmad Rasyidi Halim dan ibu Agustian Raihani menungkapkan, hambatan ini juga dikarenakan faktor dari SDM. Seperti dari pihak yang berperkaranya sudah lansia, tidak memiliki alamat elektronik (*email*) atau bahkan handphone dan nomor rekening (ATM) sehingga tidak memungkinkan bisa menggunakan *e-court* untuk berperkara persidangan secara elektronik. Dan jikalau ada, kebanyakannya dari para pihak pengadilan yang membuatkan, contoh seperti *email*.

c. Faktor Pihak Luar Yang Kurang Mendukung

Salah satu faktor yang menjadi kendala juga dalam Implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

secara elektronik ini disebabkan dengan adanya perubahan dari PERMA No 1 Tahun 2019 menjadi PERMA No 7 Tahun 2022.

Seperti yang dikatakatakan oleh ibu Hj. Lia Auliyah yang mana di PERMA Nomor 7 Tahun 2022, disitu yang memanggil para pihak bukan Jurusita lagi tapi petugas kantor pos. Mengenai hal tersebut, para pihak kantor pos bukan sama sekali dari sarjana hukum yang mengerti dan paham tentang pemanggilan para pihak yang secara resmi dan patut, terkadang banyak kendala-kendala masalah disini seperti beberapa kasus pengantaran surat.

Senada dengan itu, menurut penjelasan informan dari bapak H. Ahmad Rasyidi Halim, bahwasanya berdasarkan PERMA No 7 tahun 2022 Pasal 17 ayat 2 *“Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, Pemanggilan/Pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.”* di dalam PERMA ini yang memanggil para pihak sekarang adalah pegawai dari kantor pos, yaitu melalui surat tercatat. Pihak Jurusita mereka mempunyai kiat-kiat, mereka membawa 3 eksemplar untuk pemanggilan. Jadi meskipun Jurusita tidak menemukan para pihak, mereka menyelipkan undangan untuk sidang atau relaas, dan itu tidak diterapkan sama sekali oleh pihak pos, pegawai pos mempunyai gaya bekerjanya sendiri. Ketika pihak pos tidak menemukan alamat para pihak, pihak pos balik lagi bahkan keterangannya tidak beralamat disana. Hal seperti inilah terkadang menjadi sebuah hambatan juga dalam sebuah persidangan.

d. Faktor Kurangnya Ketegasan dari Penegak Hukum

Mengenai faktor ini yaitu tidak adanya kebijakan atau ketegasan dari

pimpinan yang mengharuskan semua perkara atau beberapa perkara persidangan nya secara *e-litigasi*. Seandainya dari pimpinan menutup persidangan secara manual untuk beberapa perkara perdata, sehingga tidak ada pilihan lagi selain wajib menggunakan secara *e-litigasi*.

Menurut penulis perkembangan teknologi yang mengiringi kehidupan manusia, selalu mengalami perkembangan dan kemajuan. Teknologi sudah menjadi bagian kehidupan manusia. Namun terkadang teknologi masih dianggap sebagai pengganggu kehidupan. Karena manusia cenderung ingin mempertahankan kondisi yang ada dan nyaman. Keterbukaan informasi terhadap pelayanan publik di pengadilan saat ini telah berbasis teknologi informasi. Pelayanan dan persidangan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat.

Perkembangan teknologi yang mengiringi kehidupan manusia selalu mengalami perkembangan dan kemajuan. Teknologi sudah menjadi bagian kehidupan manusia. Namun terkadang teknologi masih dianggap sebagai pengganggu kehidupan. Karena manusia cenderung ingin mempertahankan kondisi yang ada dan nyaman.

Namun dibalik adanya kendala-kendala dalam pengimplementasian PERMA No 1 Tahun 2019 ini, menurut penulis bukan berarti tidak adanya keuntungan yang dirasakan. Terdapat beberapa keuntungan yang dirasakan oleh pengadilan Agama Banjarbaru dalam penerapan *e-Litigasi* dan *e-Court*, diantaranya:

- a. Tercapainya Asas Peradilan yaitu Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Beracara secara sederhana dapat diartikan dengan jelas, serta cepat dapat dimaknai dengan proses penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan cepat, dan tidak berlarut larut serta dengan adanya *e-Litigasi* ini biaya yang dikeluarkan untuk beracara lebih ringan daripada bercara secara manual.⁴¹

Hal ini berdasarkan pada Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) yang mewajibkan adanya asas penting dalam hukum acara perdata yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴²

- b. Sangat membantu masyarakat dalam beracara di Pengadilan Agama Banjarbaru.
- c. Persidangan dapat dilaksanakan tanpa wajib hadir di pengadilan secara langsung.

Sebagai lembaga yang berwenang mengadili sudah seharusnya pengadilan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman terutama dalam hal mengatasi peningkatan kasus yang dibawa ke pengadilan karena perubahan pola kehidupan masyarakat. Dalam meminimalisir peningkatan tersebut perlu diadakan inovasi menggunakan teknologi dan hukum acara agar berperadilan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Inovasi ini juga didukung oleh asas-asas hukum acara yaitu Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

⁴¹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, Cet. Ke 3), hal. 14.

⁴² Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: PERMASalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020, Cet. 1), hal. 10.

Peradilan harus sederhana yaitu tidak berbelit-belit sehingga tidak mengecewakan para pencari keadilan. Peradilan harus cepat berfungsi menimbulkan keadilan untuk menghindari terjadinya suatu perkara diadili bertahun-tahun dan dilanjutkan kepada ahli waris pencari keadilan. Peradilan harus murah dikarenakan pengadilan merupakan tempat untuk rakyat mencari keadilan, sehingga peradilan harus dilakukan dengan biaya yang ringan dengan tujuan supaya rakyat pencari keadilan dapat membayarnya. Perlunya sosialisasi lebih kepada masyarakat agar pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menjadi optimal karena ketika hal ini dilaksanakan sebagaimana semestinya tentu akan mempermudah proses beracara di pengadilan.